

# Peran Transparansi dalam Memoderasi Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Muh Mujihal Fikri Jalil<sup>1</sup>, Jamaluddin Majid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

[jamalmajid@gmail.com](mailto:jamalmajid@gmail.com) (koresponden)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan variabel transparansi sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh responden, kemudian dianalisa dengan regresi berganda dan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. sebaliknya transparansi tidak mampu memoderasi penerapan SAP dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, tetapi mampu memoderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

## ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of Government Accounting Standards, Regional Financial Information Systems, and HR competencies on the quality of local government financial reports in Wajo Regency with transparency as a moderating variable. This study uses a quantitative method with an associative causal approach. The method of data collection is done by filling out questionnaires by respondents, then analyzed by multiple regression and Moderated Regression Analysis. The results of the study revealed that the application of Government Accounting Standards, Regional Financial Information Systems, and HR competencies partially had a significant and positive effect on the quality of regional financial reports. on the other hand, transparency is not able to moderate the application of SAP and the Regional Financial Information System, but can moderate the competence of human resources on the quality of financial reports.

Volume 7

Nomor 1

Halaman 75-89

Makassar, Juni 2022

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

1 Juni 2022

Tanggal Revisi

16 Juni 2022

Tanggal diterima

24 Juni 2022

## Kata Kunci :

Penerapan SAP, Sistem Informasi Keuangan, SDM, Kualitas Laporan Keuangan, dan Transparansi

## Keywords :

*Penerapan SAP, Sistem Informasi Keuangan, SDM, Kualitas Laporan Keuangan, dan Transparansi*



Mengutip artikel ini sebagai : Jalil, Muh Mujihal Fikri dan Jamaluddin Majid. 2022. Peran Transparansi dalam Memoderasi Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Tangible Jurnal*, 7, No.1, Juni 2022, Hal. 75-89. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.254>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan peluang terhadap pemerintah daerah untuk bersaing dalam upaya kemandirian daerah, dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,

diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Azlim dkk., 2012). Guna mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, tentu dibutuhkan suatu pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan kesadaran akan kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Pelaporan keuangan selalu dikaitkan dengan *stewardship teory*. Laporan keuangan yang memiliki kualitas baik dimaknai sebagai suatu bentuk atau wujud tanggung jawab aparatur terhadap amanah yang terkandung didalam laporan keuangan itu. Pelaporan keuangan pada dasarnya memberikan bantuan terhadap pemenuhan urgensi *financial user* yang memiliki limit dalam pemerolehan informasi sebagai suatu bentuk penjaminan amanah kepada masyarakat (Syarifudin, 2014). Tanggung jawab ini menjadi hal yang sangat vital karena pada dasarnya ada amanah yang diemban oleh birokrasi kepada seluruh *stakeholder*. Pelaporan keuangan yang dilakukan wajib memenuhi kualitas yang linear dan relevan terhadap regulasi maupun SAP. Hal tersebut dinyatakan memiliki kualitas yang baik apabila laporan keuangan yang disajikan memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Armel, 2017). Hal ini telah dipenuhi oleh berbagai pemerintah daerah yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya Pemerintah Kabupaten Wajo. Dilansir dari [mediasinergi.co](http://mediasinergi.co) (2020), berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Wajo untuk tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini diberikan karena penyajian LKPD Kabupaten Wajo telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAP.

SAP merupakan suatu kemutlakan yang wajib menjadi *guide* dalam upaya menciptakan pelaporan keuangan yang memiliki kualitas khususnya ditingkat pemerintah daerah (Wati dkk., 2014). SAP adalah syarat yang berkekuatan hukum dan memiliki orientasi terhadap peningkatan dan perwujudan laporan keuangan yang berkualitas (Juwita, 2013). Dalam urgensi tersebut, *Financial user report* akan mendayagunakan SAP guna mencari pemahaman terhadap informasi yang tersaji didalamnya serta berfungsi sebagai SOP dalam penyatuan pandangan diantara *stakeholder* terkait (Zeyn, 2017b). Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Wati dkk., 2014). Penelitian ini juga diperkuat oleh Oktarina dkk. (2016) yang mengungkapkan hasil yang sama, dimana kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah.

Selain suatu standar baku yang menjadi kerangka konseptual, tentunya dibutuhkan suatu sistem yang bisa menjadi wadah penerapan yang efektif. Sistem ini kemudian dikenal dengan SIKD. SIKD ini sangat diperlukan guna menghadirkan kualitas dalam laporan keuangan pmda. SIKD adalah sebuah pedoman bertahap sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wati *et. al.*, 2014). SIKD didefinisikan sebagai sebuah pola pengelompokan, kategorisasi, dan pengelolaan finansial birokrasi dan

menjadi salah satu sarana pengambilan sikap terhadap suatu kebijakan (Yuliani dkk., 2010). Menurut Sudaryanti (2013) penerapan sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan finansial dan kerja-kerja strategis dalam sebuah lembaga yang berperan melayani masyarakat khususnya terkait bidang finansial, sehingga penerapan sistem informasi keuangan daerah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kehadiran standar yang menjadi kerangka konseptual serta sistem sebagai wadah penerapannya tentunya tidak akan berjalan beriringan secara efektif tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai yang paham akan standar dan bisa menjalankan sistem secara efektif dan efisien. Uraian ini sejalan dengan penelitian Wati dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian serupa diungkapkan oleh Hendri dan Erinos (2020) yang mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang lebih spesifik dilakukan oleh Yenni dkk. (2020) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi (menguatkan) pengaruh positif penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kehadiran SAP, SIKD, dan juga sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas yang diukur dengan beberapa kriteria seperti transparansi.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Albugis, 2016). Menurut Oktarina dkk. (2016) transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. *Good governance* menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara (Zeyn, 2011). Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, *good governance* merupakan sistem yang membantu peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Keharusan untuk melaksanakan transparansi membuat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diterapkan dengan patuh dan sesuai dengan regulasi. Transparansi dalam pelaksanaannya difungsikan sebagai penjagaan amanah finansial yang terkelola (Rawlin, 2018). Sama halnya dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (SIKD) juga menjadi indikator yang bisa menciptakan transparansi. Transparansi dapat mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Fajri dkk., 2019). Transparansi membuat Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu meningkatkan kapabilitasnya demi menjadikan kualitas laporan yang baik. Oleh karena

itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas (Albugis, 2016). Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi Pemerintahan, Keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatuh pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan (Nurrizkiana dkk., 2017).

Penelitian ini memiliki orientasi untuk menganalisa bagaimana pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo sama seperti yang diteliti oleh Hajra dan J. Majid. (2021) terkait pentingnya keandalan laporan keuangan sebagai suatu kinerja pemerintah juga dipengaruhi oleh kualitas SDM. Selain itu, penelitian juga ingin menganalisa bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan dengan penambahan variabel transparansi sebagai pemoderasi.

### Tinjauan Teori

#### **Pengembangan Hipotesis**

Juwita (2013) menjelaskan bahwasanya SAP adalah syarat yang berkekuatan hukum dan memiliki orientasi dalam rangka mengelevasi kualitas pelaporan keuangan birokrasi diNegeri ini. Standar ini adalah rerangka yang terkonsep dan dimaksudkan untuk penyusunan serta penyajian pelaporan keuangan yang memiliki kualitas. Olehnya itu, dibutuhkan pengetahuan dan visualisasi yang baik terhadap SAP agar tujuan pengelevasian yang dimaksud bisa diwujudkan secara menyeluruh (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Dengan demikian, dapat dimaknai bilamana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Wati dkk., 2014). Penelitian ini juga diperkuat oleh Oktarina dkk. (2016) yang mengungkapkan hasil yang sama, dimana kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selain suatu standar baku yang menjadi kerangka konseptual, tentunya dibutuhkan suatu sistem yang bisa menjadi wadah penerapan yang efektif. Sistem ini kemudian dikenal dengan SIKD. SIKD ini sangat diperlukan guna menghadirkan kualitas dalam laporan keuangan pemda. SIKD adalah sebuah pedoman bertahap sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wati *et. al.*, 2014). SIKD didefinisikan sebagai sebuah pola pengelompokkan, kategorisasi, dan pengelolaan finansial birokrasi dan menjadi salah satu sarana pengambilan sikap terhadap suatu kebijakan (Yuliani dkk., 2010). Menurut Sudaryanti (2013) penerapan sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan finansial dan kerja-kerja strategis dalam sebuah lembaga yang berperan melayani masyarakat khususnya terkait bidang finansial, sehingga penerapan sistem informasi keuangan daerah

ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Hanifa dkk. (2016) mengungkapkan bahwasanya jika terdapat kelemahan dalam SIKD maka kehandalan dan tingkat relevansi outputnya juga akan menjadi tidak berbobot, sehingga penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Arifin dan Pratolo, 2012 dan Yuliani dkk., 2010).

H2: Sistem Informasi Keuangan Daerah Bepengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kehadiran standar yang menjadi kerangka konseptual serta sistem sebagai wadah penerapannya tentunya tidak akan berjalan beriringan secara efektif tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai yang paham akan standar dan bisa menjalankan sistem secara efektif dan efisien. Uraian ini sejalan dengan penelitian Wati dkk. (2014) yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian serupa diungkapkan oleh Hendri dan Erinos (2020) yang mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang lebih spesifik dilakukan oleh Yenni dkk. (2020) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi (menguatkan) pengaruh positif penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keharusan untuk melaksanakan transparansi membuat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diterapkan dengan patuh dan sesuai dengan regulasi. Transparansi dalam pelaksanaannya diterapkan dalam upaya penjagaan terhadap amanah terkait pengelolaan anggaran (Rawlin, 2018). Transparansi menjadi satu dari lima indikator GG yang berarti adanya sifat terbuka dari birokrasi untuk bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* (Arista dan Suartana, 2016).

H4: Transparansi memoderasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SIKD juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menciptakan transparansi. Transparansi dimaknai sebagai bentuk sikap terbuka kepada siapapun yang berkepentingan selagi masih sejalan dengan koridor hukum, regulasi, dan standar yang berlaku. Dengan demikian, SIKD di sini hadir untuk memudahkan aksesibilitas publik mengenai urgensi tersebut. Transparansi dapat mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Fajri dkk., 2019).

H5: Transparansi memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi membuat Sumber Daya Manusia (SDM) harus

mampu meningkatkan kapabilitasnya demi menjadikan kualitas laporan yang baik. Transparansi dimaknai sebagai bentuk sikap terbuka kepada siapapun yang berkepentingan selagi masih sejalan dengan koridor hukum, regulasi, dan standar yang berlaku. Dengan demikian, SIKD di sini hadir untuk memudahkan aksesibilitas publik mengenai urgensi tersebut. Maka dari itu, hal ini kemudian membutuhkan SDM dengan kompetensi yang berkualitas guna menghadirkan pelaporan keuangan dengan standar yang diharapkan (Albugis, 2016).

H6: Transparansi memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu *quantitative approach* berupa numerikal atau statistikal. Tipe riset ini juga bisa didefinisikan sebagai pengkajian terhadap komunitas data tertentu dan memiliki orientasi untuk melakukan pengujian terkait hipotesis yang telah diformulasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausalitas komperatif. Pendekatan kausalitas komperatif merupakan penelitian yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2013).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Secara umum, jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi adalah 30 subyek per grup umumnya di anjurkan (Kuncoro: 2013). Metode penentuan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yakni non-probabability sampling dengan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu. Sampel yang dipilih hanya yang berkaitan dengan proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penata Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan selisih mutlak.

**Tabel 1. Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi	Indikator
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum maupun khusus demi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengidentifikasian</li> <li>2. Pengklasifikasian</li> <li>3. Penjaminan reliabilitas</li> <li>4. Penghitungan pengaruh masing-masing operasi.</li> </ol> <p><b>Sumber: Zeyn (2017)</b></p>
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2)	Sistem informasi keuangan daerah merupakan penerapan sistem di dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kecepatan</li> <li>2. Tingkat Keamanan</li> <li>3. Tingkat efisiensi biaya</li> <li>4. Tingkat kualitas</li> </ol>

	rangka pengambilan keputusan	hasil <b>Sumber: Yusniyar (2014)</b>
Kompetensi SDM (X3)	Sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya	1. Keterampilan 2. Pengetahuan 3. Sikap dan Tingkah Laku <b>Sumber: Inapty dkk. (2016)</b>
Kualitas LKPD (Y)	Kualitas laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu SKPD yang disusun secara sistematis oleh penata laporan keuangan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu organisasi yang telah menjalankan berjalan selama periode tertentu	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami <b>Sumber: Silviana dan Antoni (2014) dan Yusniyar (2014)</b>
Transparansi (M)	Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.	1. Aksesibilitas yang mudah untuk mengakses dokumen anggaran 2. Ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban 3. Mengakomodir suara masyarakat 4. Metode penyampaian informasi yang sesuai dengan regulasi dan tuntutan publik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Parsial untuk H1, H2 dan H3

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4,741	4,303		-1,102	,280
1 Kompetensi SDM	,165	,067	,288	2,467	,020
Penerapan SAP	,149	,054	,377	2,764	,010
Sistem Informasi Keuangan Daerah	,138	,062	,333	2,230	,034

Dari tabel di atas juga, dapat dibuat penafsiran terkait dengan

hipotesis yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Skor koefisien 0.165 dan probabilitas signifikansi 0.020 merepresentasikan bahwasanya kompetensi SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika hipotesis yang dirumuskan dinyatakan diterima.
2. Skor koefisien 0.149 dan probabilitas signifikansi 0.010 merepresentasikan bahwasanya penerapan SAP memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika hipotesis yang dirumuskan dinyatakan diterima.
3. Skor koefisien 0.138 dan probabilitas signifikansi 0.034 merepresentasikan bahwasanya SIKD memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika hipotesis dinyatakan diterima.

**Tabel 3. Hasil Uji Parsial untuk H4, H5 dan H6 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72,870	55,867		1,304	,204
Kompetensi SDM	-1,717	,826	-2,991	-2,080	,048
Penerapan SAP	,264	,819	,669	,322	,750
Sistem Informasi	1,278	,860	3,087	1,486	,150
1 Keuangan Daerah	-1,826	1,322	-1,625	-1,382	,180
Transparansi					
X1_M	,044	,019	6,211	2,291	,031
X2_M	-,002	,020	-,385	-,109	,914
X3_M	-,027	,021	-4,351	-1,314	,201

Dari tabel di atas juga dapat dibuat penafsiran terkait dengan hipotesis yang dibentuk sebelumnya sebagai berikut:

1. Skor koefisien 0.044 dan probabilitas signifikansi 0.031 yang merepresentasikan bahwa kehadiran transparansi sebagai pemoderasi mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan diterima.
2. Skor koefisien -0.002 dan probabilitas signifikansi 0.914 merepresentasikan bahwa kehadiran transparansi sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan ditolak.
3. Skor koefisien -0.027 dan probabilitas signifikansi 0.201 merepresentasikan bahwa kehadiran transparansi sebagai pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan antara



SIKD dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan ditolak.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa SAP merupakan suatu standar dengan *power of law* yang sangat kuat di mana peruntukannya untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini relevan dengan beberapa penelitian seperti Wati *et. al.* (2014) dan Oktarina *et. al.* (2016) yang memiliki temuan sama yakni penerapan SAP berpengaruh signifikan bagi kualitas laporan keuangan, (Juwita 2013).

Kehadiran SAP tentunya diharapkan mampu memengaruhi kualitas kerja penata laporan keuangan dan mengarahkannya kepada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini relevan dengan apa yang dijelaskan dalam *stewardship theory* di mana peran yang diemban oleh suatu *steward* atau pelayan publik harus bisa relevan sesuai dengan regulasi dan juga kebutuhan publik serta *stakeholder* selaku pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (Zeyn, 2017b). Dengan demikian, dapat dimaknai bahwasanya kehadiran SAP dapat memberikan pengaruh yang baik dalam upaya mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan secara gamblang apa yang termaktub dalam *stewardship theory*, yakni pemerintah selaku pengayom masyarakat harus bisa menerapkan suatu aturan atau kesepakatan publik guna mencapai apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan berbagai regulasi lainnya.

### **Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memberikan pengaruh secara positif dan juga signifikan bagi kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian relevan dengan apa yang diungkapkan Hanifa *et. al.* (2016) bahwa SIKD memengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan. Pada hakikatnya, sistem yang lemah tentunya akan menimbulkan masalah seperti berkurangnya level kehandalan laporan keuangan, inerelevannya laporan keuangan yang dibuat, serta memengaruhi seberapa baik putusan yang diambil. Arifin dan Pratolo (2012) dan Yuliani dkk. (2010) menyatakan hal yang sama, di mana SIKD memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas laporan keuangan.

Implementasi SIKD diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang

transaparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Dengan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tersebut maka potensi untuk menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas menjadi terbuka lebar. Menurut Hanifa dkk. (2016) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk membuat keputusan, sehingga penerapan sistem informasi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik. Hal ini relevan dengan apa yang dijelaskan dalam teori TAM khususnya pada elemen *perceived of usefulness*. Dalam elemen tersebut dijelaskan bahwa penerapan suatu sistem atau teknologi harus bisa menghadirkan kebermanfaatan dari berbagai sisi. Artinya, suatu sistem seperti SIKD harus bisa memberikan manfaat sebagaimana fungsi yang diharapkan dengan kehadirannya sebagai suatu sistem. Menurut Sudaryanti (2013) implementasi SIKD ditujukan dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Implementasi SIKD diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan SIKD tentunya diharapkan mampu menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik yang bermuara pada laporan keuangan yang berkualitas pula.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Temuan penelitian ini merepresentasikan bahwa kompetensi SDM memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian memiliki relevansi dengan penelitian Wati *et. al.* (2014) serta Hendri dan Erinos yang juga mengemukakan bahwa kompetensi SDM yang baik akan mampu memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan secara positif dan signifikan. Temuan yang lebih spesifik diungkapkan oleh Yenni *et. al.* (2020) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM mampu menjadi pemoderasi penerapan SIKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kehadiran Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menjadi kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan serta Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai wadah perwujudan laporan keuangan yang berkualitas tentunya tidak akan berjalan beriringan secara efektif tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai yang paham akan standar dan bisa menjalankan sistem secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, SDM menjadi komponen utama dalam tiap program dan tujuan yang telah ditetapkan, tidak terkecuali dalam rangka menghadirkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Temuan penelitian ini relevan dengan peranan SDM sebagai *steward* yang dijelaskan dalam *stewardship theory*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwasanya individu ataupun kelompok yang dalam suatu organisasi adalah pemegang peranan penting terhadap segala tujuan, program, dan sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa SDM memberikann pengaruh yang positif dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Olehnya itu, temuan penelitian ini membuktikan bahwa

pemerintah sebagai *steward* harus memiliki kompetensi (*skill*) yang memadai dari berbagai aspek agar penerapan SIKD maupun SAP dapat dimaksimalkan sebagaimana peruntukannya.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi Transparansi**

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi tidak mampu menjadi pemoderasi hubungan penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rawlin (2018) bahwa transparansi dimaksudkan guna menjaga kepercayaan dalam pengelolaan anggaran yang sedang dikelola.

Keharusan untuk melaksanakan transparansi membuat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diterapkan dengan patuh dan sesuai dengan regulasi. Transparansi dalam pelaksanaannya digunakan dalam menjaga kepercayaan terkait dengan anggaran yang ingin dikelola (Rawlin, 2018). Lebih lanjut lagi Gerometta dkk. (2005) menyatakan terkait transparansi yang merupakan salah satu faktor *good governance* dapat terbangun, di mana hal ini dapat mencerminkan pengelolaan pemerintahan telah bebas korupsi. Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah terkait aspek pelayanan publik yang pada akhirnya menjadikan pemerintah bertanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan pada organisasi sektor publik (Arista dan Suartana, 2016).

### **Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimoderasi Transparansi**

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi tidak mampu menjadi pemoderasi antara SIKD dengan kualitas laporan keuangan. Artinya, sistem dapat digunakan untuk mengelabui transparansi itu sendiri dan hal ini tentu tidak sesuai dengan etika dan regulasi yang berlaku. Keharusan untuk melaksanakan transparansi seharusnya membuat SIKD harus difungsikan dengan patuh dan sesuai dengan regulasi. Transparansi dalam pelaksanaannya digunakan dalam menjaga kepercayaan terkait dengan anggaran yang ingin dikelola (Rawlin, 2018). Lebih lanjut lagi Gerometta dkk. (2005) menyatakan transparansi merupakan salah satu indikator *good governance* dapat terbangun, apabila dapat mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintahan telah bebas korupsi. Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah terkait aspek pelayanan publik yang pada akhirnya menjadikan pemerintah bertanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan pada organisasi sektor publik (Arista dan Suartana, 2016).

Temuan penelitian tidak relevan dengan prinsip *perceived to use* yang termaktub dalam teori TAM di mana SIKD sebagai suatu sistem harus bisa memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi seluruh *stakeholder*. Pada dasarnya, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menciptakan transparansi, yakni guna mempermudah proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah berusaha menggalakkan penerapan sistem informasi yang dapat membantunya

untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam jangka periode tertentu kepada publik. Transparansi dapat mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Fajri dkk., 2019).

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimoderasi Transparansi**

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi mampu menjadi pemoderasi pengaruh SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, adanya keharusan untuk berlaku transparan membuat SDM semakin serius mewujudkan kualitas laporan yang berkualitas. Transparansi membuat SDM harus mampu meningkatkan kapabilitasnya demi mewujudkan kualitas laporan yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Albugis, 2016).

Temuan penelitian ini menjelaskan bagaimana penekanan teori *stewardship* mengenai apa yang harus dilakukan oleh suatu pekerja terhadap berbagai tuntutan yang ada dalam tanggungjawabnya. Artinya, pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah *steward* bagi masyarakat dan pemerintah di atasnya harus mampu menghadirkan SDM yang memiliki kompetensi untuk bisa mewujudkan laporan keuangan berkualitas secara berkelanjutan dan dalam waktu yang lama sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan kompetensi SDM secara parsial memengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan dan positif. Disisi lain, transparansi tidak mampu memoderasi penerapan SAP dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) tetapi mampu memoderasi secara signifikan dan positif kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albugis, F. F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3): 78-89.
- Arifin, J. F., dan S. Pratolo. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Model Delon dan Mclean. *Jurnal akuntansi & Investasi*, 13(1): 28-34.
- Arifin, N. M., L. Handajani, dan Alamsyah. Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan *Stakeholder* (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Mataram). *Jaffa*, 4(2): 121-144.
- Armel, R. Y. G. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1): 105- 119.

- Arista, A.A S. A. N., dan I W. Suartana. 2016. Pemahaman Atas SAP sebagai Pemoderasi Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pada Kinerja Anggaran SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 17(2) : 1667-1699.
- Azlim., Darwanis, dan U. A. Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1):1-14.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Wajo dalam Angka*. Kabupaten Wajo: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, S. A. N., dan A. Dwirandra. 2013. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1): 196-214.
- Fajri, R. N., Djumali, dan S. Hartono. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat, dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ekonomi Vokasi*, 2(1): 1-15.
- Gerometta, J., H. Haussermann, dan G. Longo. 2005. Social Innovation and Civil Society in Urban Governance: Straegies for an Inclusive City. *Urban Studies*, 42(11): 1-16.
- Hajra dan Jamaluddin Majid. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Wajo. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1).
- Hanifa, L., A. B. Wawo, dan Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 65-80.
- Inapty, M. A. F. B. A., dan R. S. P. Martiningsih. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1): 27-42.
- Juwita, R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2): 201-214.
- Mayasari, R. P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 2(1): 48-64.
- Munasyir. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Acehutara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4): 23-35.
- Nosihana, A., dan R. Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2): 89-104.
- Nugraheni, P., dan I. Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

*Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(13): 48-58.

- Nurrizkiana, B., L. Handayani, dan E. Widiastuty. 2017. Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1): 28-47.
- Oktarina, M., K. Raharjo, dan R. Andini. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. *Journal Of Accounting*, 2(2)1-15.
- Pujiswara, I. B., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 1-12.
- Putri, A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1): 699-713.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1): 37-46.
- Rawlin, B. L. 2008. Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Public Relations Journal*, 2(2): 1-21.
- Selviana, dan E. Antoni. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat. *Profita*, 6(1): 24-36.
- Setyowati, L., W. Isthika, dan R. D. Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2): 179-191.
- Sudaryanti, D. 2013. Pengaruh Penganggaran terhadap Kinerja Aparat PEMDA melalui Sistem informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(01): 11-24.
- Surjono, W, dan N. R. Firdaus. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1): 1357-1368.
- Susilawati, dan D. S. Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR- Study & Accounting Research*, 11(1): 15-32.
- Syarifudin, A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(02): 26-44.
- Udiyanti, N. L. N., A. T. Atmadja, dan N. A. S. Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 1-11.

Wati, K. D., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 1-11.